



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SA'DUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 57931

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.804.200.000**

1. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 542.000.000
3. Tanah Seluas 2248 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
4. Tanah Seluas 2484 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 452 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 553.700.000
6. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000
7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 573.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	168.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.445.287.910
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.990.487.910
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.990.487.910

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.